

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia menganut sistem demokrasi. Meski sistem ini belum sepenuhnya berfungsi, Indonesia telah mampu menciptakan ruang kebebasan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi. Hal ini memberikan dampak terhadap pembentukan partai politik sebagai alat dan pilar terpenting dalam pemenuhan demokrasi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri demokrasi Indonesia tidak bisa berjalan tanpa kehadiran partai politik. Partai politik di Indonesia ini akan mempermudah aspirasi, pendapat, serta keluhan rakyat untuk diserap dan diarahkan agar dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Salah satu teknik untuk mengatur dan memungkinkan pemilih memilih wakil rakyat adalah dengan sistem pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan yang mereka pilih untuk duduk di jabatan publik selama pemilihan ini. Secara alami, agar warga negara dapat menggunakan suaranya, harus ditetapkan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan secara bebas dan tanpa tekanan dari luar. Proses pemungutan suara mencakup banyak komponen yang rumit.¹ Perlu disebutkan bahwa pemilu nasional telah diselenggarakan lima kali sepanjang era reformasi: tahun 1999, 2004, 2008, 2010, 2014 dan nantinya akan bertambah menjadi 6 kali pada tahun 2024 mendatang.²

Partai politik memiliki pengertian sebagai organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga Indonesia dengan tujuan bersama untuk memajukan dan membela kepentingan politik para pemilihnya dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.³ Menurut para pemerhati dan akademisi ilmu politik, partai politik adalah kumpulan individu-individu yang stabil dan terorganisir, yang memiliki kesamaan ideologi, dan bekerja untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui pemilihan untuk melaksanakan kebijakan luas yang telah mereka susun. Kebijakan keseluruhan partai adalah perpaduan dari berbagai kepentingan masyarakat, dan sarana untuk memenangkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan untuk mengimplementasikan keseluruhan kebijakan ini adalah melalui pemilihan umum.⁴

¹ Sigit dan Pamungkas, Perihal Pemilu, *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, Yogyakarta, 2009., 14-23.

² Nia Sofiyatul Millah & Dinie Anggraeni Dewi, *SKPP BAWASLU sebagai sarana pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara*, (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2, 2021). 356

³ A. Gau Kadir, *Dinamika Partai Politik di Indonesia*, (Jurnal Sosiohumaniora; Volume 16 No. 2, 2014). 134

⁴ Elly M. Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA Group, 2013). 277-278.

Setiap partai politik harus memiliki strategi marketing yang bagus untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Pengertian strategi marketing sendiri adalah rangkaian metode yang digunakan untuk membantu partai politik mempromosikan kepada publik gagasan, ajaran, ideologi, dan kecenderungan politik para pemimpin partai serta rencana kerja, visi, dan tujuan mereka masing-masing. Kampanye atau positioning adalah dua cara pemasaran politik yang digunakan di Indonesia. Pemasaran politik memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bidang studi ilmiah karena memerlukan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuannya.⁵

Partai-partai di Indonesia yang terdaftar pasca Reformasi tahun 1999 diantaranya adalah; Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Umat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Umat, Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Pekerja Indonesia . Dan hanya 21 partai politik yang mendapatkan Kursi di tahun 1999.⁶

Masing-masing partai akan melaksanakan proses atau tahapan pemilihan umum sebelumnya, termasuk kampanye, serta tugas-tugas lain yang telah ditentukan sebelumnya. Kampanye ini sebagai strategi yang mencoba mengumpulkan kekuatan serta pengaruh sebanyak-banyaknya melalui hasil pemilu yang sukses untuk mempromosikan kebijakan yang dapat menghasilkan perbaikan masyarakat. Dalam demokrasi, pemilihan demokratis dengan memakai berbagai bentuk digunakan untuk melakukan transfer otoritas atau mengambil alih kekuasaan serta peluang. Untuk memiliki pengaruh konstitusional terhadap eksekutif, persentase suara seseorang di pasar pemilu perlu ditingkatkan. Bahkan partai politik sendiri

⁵ Andries Kango, *Marketing Politik Dalam Komunikasi Politik*, Jurnal Farabi, Vol. 11, No. 1, Juni (2014), 57-58.

⁶ Lili Romli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia* (Jurnal politica Vol. 2, No. 2, 2011) 139

kerap memandang penggunaan kampanye sebagai hal yang negatif. Namun terbukti, tanpa otoritas yang dimiliki politisi filosofi politik partai lawan akan dilaksanakan.⁷

KPU Kabupaten Jepara dalam hal ini juga melaksanakan verifikasi faktual pada tahun ini terhadap beberapa partai politik lolos pada tahap administrasi untuk PEMILU tahun 2024. Terdapat sembilan parpol yang lulus di tahap verifikasi administrasi pada pemilu tahun 2019 dengan ambang batas 4% pendapatan suara yang sah sehingga mereka dinyatakan lolos verifikasi virtual di kabupaten Jepara untuk mengikuti PEMILU 2024, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, dan PPP. Partai tersebut dikatakan sudah sah dengan terpenuhinya syarat administrasi oleh KPU RI. Sehingga KPU Jepara hanya memverifikasi faktual terhadap delapan partai politik untuk PEMILU 2024 mendatang. Delapan partai yang diverifikasi faktual adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai UMMAT, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda).⁸ Di kabupaten Jepara partai PPP dan PDIP memiliki strategi khusus yang digunakan untuk mendapatkan suara dalam pemilu 2019.

Pada tahun 2019 PPP dan PDIP termasuk dalam sembilan partai yang dinyatakan lolos oleh KPU karena memperoleh suara melebihi batas ambang parlemen 4%, yakni sebanyak 6.323.147 (4,52%) untuk PPP dan 27.053.961 (19,33%) untuk PDIP.⁹ Beberapa strategi yang digunakan PPP dalam memperoleh suara di kabupaten Jepara sehingga dinyatakan lolos oleh KPU antara lain PPP mencampur berbagai isu Islam dengan isu pendidikan, ekonomi, dan kerakyatan. Isu dalam Islam dan kepentingan masyarakat tidak pernah tertinggalkan, justru PPP mengaitkan hal tersebut dengan isu ekonomi serta pendidikan. Untuk strategi yang digunakan PDIP yakni dengan bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Dari strategi-strategi tersebut, pada akhirnya mengantarkan PPP dan PDIP lolos ke Pemilihan legislative pada tahun 2019.

Pemilu kelima di era reformasi akan berlangsung pada tahun 2019. Pelaksanaan pemilu kali ini secara keseluruhan sudah tertib dan aman. Namun, ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan ketika menilai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Penggunaan pemilu sebagai sarana legalisasi penyederhanaan sistem kepartaian merupakan salah satu aspek yang perlu dipertanyakan. Di sisi lain, Pemilu 2019, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislative justru menyebabkan perubahan dinamika politik antara legislatif

⁷ Eter Schroder, *Strategi Politik edisi revisi Pemilu 2009* (Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung für die Freiheit, Indonesia 2009) 7.

⁸ <https://infojateng.id/read/25232/kpu-jepara-verifikasi-faktual-delapan-parpol-peserta-pemilu-2024/>

⁹ <https://www.kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita>. Di akses tanggal 13 April pukul 12.27.

dan eksekutif. Hal itu terlihat dari sejumlah perkembangan politik di masa-masa awal pemerintahan pemilu 2019.

Tanda awal gejolak politik di parlemen adalah kekacauan pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Landasan utama untuk proses pelembagaan ini haruslah pelembagaan legislatif pemilu dengan tujuan mencapai sistem multi-partai yang lugas dan memastikan keberhasilan penyelenggaraan sistem presidensial. Implementasi dari kajian yang berkaitan dengan pelembagaan pemilu di masa depan kemudian didorong oleh keadaan ini. Dalam rangka menginformasikan persiapan pelembagaan pemilu mendatang dalam rangka mewujudkan sistem multipartai yang lugas dan sistem presidensial yang efisien, kajian ini bertujuan untuk mengelaborasi pemilu 2019 dan segala kelengkapannya.¹⁰

Calon legislatif dari luar partai termasuk kelompok yang dibutuhkan, bersama dengan calon kader partai, dan mereka akan diurutkan dalam daftar panjang. “Jadi, kita harapkan calon itu adalah orang-orang yang mampu meraih suara banyak di daerah pemilihan masing-masing pada pemilu mendatang.” Ia berkata, bahwa pemilu kedepannya minimal PPP harus mendapat lebih dari 10 kursi pada setiap daerah pemilihan Kabupaten Jepara. Pemilu sebelumnya, PPP sudah mendapat 3 kursi, sedang PDIP di tahun 2019, menargetkan 50 kader partai yang nantinya bisa masuk jajaran pimpinan DPRD. Sedangkan pada tahun lalu hanya mendapatkan 8 Kursi saja.¹¹ hal itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat jepara termasuk dalam golongan masyarakat agamis dilihat dari hasil perolehan kursi dimana partai yang terdapat basis agama (PPP) mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan partai nasional (PDIP).

Untuk memenangkan pemilihan legislatif di kota Jepara tahun 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing memiliki strategi politiknya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pihak-pihak mana yang akan menggunakan salah satu dari strategi tersebut. Seperti halnya PPP dimana strategi yang digunakan lebih berbasis ke hal agama yaitu seperti dengan kampanye dari mengisi kajian-kajian di Jepara karena seperti yang diketahui masyarakat jepara bahwa sebagian besar anggota partai PPP merupakan Kyai atau pendakwah, sedangkan PDIP startegi yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti donor darah, dan melalui pendidikan politik. Sehingga strategi dari kedua partai cukup dapat dilihat perbedaanya dengan jelas. Berdasarkan latar belakang dan juga strategi dari kedua partai politik diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan tema Strategi Partai Politik dalam menyongsong PEMILU tahun 2024 dan mengambil judul Strategi PPP dan PDIP dalam menyongsong pemilu 2024 di Kabupaten Jepara.

¹⁰ Hans, dkk: Denied, *Dismissed or Redundant? A Critique, dalam Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, Richard Gunther, Jose Ramon-Montero dan Juan J. Linz (ed.), Oxford University Press, 2002

¹¹ https://profilpelajar.com/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Jepara

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memuat topik-topik pokok yang diangkat dalam penelitian ini sesuai dengan strategi politik. Sesuai dengan judul yang dipilih maka dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Strategi PDIP dan PPP dalam menyongsong pemilu 2024

Pengembangan dari fokus tersebut maka peneliti ingin mengamati beberapa hal yaitu strategi partai PDIP dalam menyongsong pemilu 2024, strategi PPP dalam menyongsong PEMILU 2024, serta perbedaan strategi antar kedua partai dalam menghadapi PEMILU 2024.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Strategi Partai PPP dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Jepara?
2. Bagaimana Strategi Partai PDIP dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka berikut tujuan penelitiannya:

1. Untuk mengetahui Strategi Partai PPP dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Jepara.
2. Untuk mengetahui Strategi Partai PDIP dalam Menyongsong Pemilu 2024 di Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan dalam Membuat karya tulis ilmiah, serta melalui penelitian ini dapat menambah Pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat, sehingga Dapat ditindak lanjuti dengan penelitian lebih luas dan mendalam tentang Strategi partai politik Islam dan nasional.
3. Secara akademis dapat menambah refresentasi bagi mahasiswa, khususnya Mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian, sistematika penulisan yang digunakan diharapkan agar dapat memperoleh gambaran bab secara luas. Metode penulisan ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi suatu laporan. Sistematikanya terdiri dari:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, tabel, dan gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

Bagian isi. terdiri dari garis besar laporan yang terdiri dari lima bab, yang saling berhubungan satu sama lain. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian tentang Strategi Partai Politik dalam menyongsong PEMILU 2024

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan telaah pustaka tentang Partai Politik, Pemilu, gambaran umum PDIP dan PPP, dan strategi kedua partai. Di dalamnya juga terdapat hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi bagaimana jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat pendidikan.